

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, periode 1959-1966 merupakan masa transisi yang penting dalam politik Indonesia, di mana Islam dan Demokrasi Terpimpin mulai saling berinteraksi, dan proses kristalisasi ideologi terjadi dalam bentuk kesepakatan politik meskipun dengan tantangan yang besar baik di dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat.

Proses kristalisasi pada tahun 1959-1966 menandai sebuah peralihan yang penting dalam politik Indonesia, dengan Demokrasi Terpimpin menjadi titik temu antara berbagai ideologi. Bagi umat Islam, hal ini memberi peluang untuk menegaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan politik Islam, namun juga menuntut kewaspadaan dalam menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan keterlibatan aktif dan musyawarah, umat Islam dapat berperan dalam membangun pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

B. SARAN

Proses kristalisasi yang terjadi antara tahun 1959 hingga 1966 di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Partai Islam dan Demokrasi Terpimpin, merupakan bagian penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada periode ini, terjadi berbagai perkembangan yang mempengaruhi hubungan antara Islam dan negara serta sistem pemerintahan yang diterapkan. Berikut adalah beberapa saran atau perspektif yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, berdasarkan analisis dari sudut pandang Islam dan Demokrasi Terpimpin:

1. Pemahaman tentang Demokrasi Terpimpin:

Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1959 berusaha untuk menata negara Indonesia dengan menanggalkan sistem parlementer yang dianggap

tidak efektif. Dalam praktiknya, Sukarno berusaha untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang lebih otoriter dengan menekankan pada kekuasaan presiden yang kuat, namun tetap berusaha menjaga keseimbangan antara berbagai kelompok politik, termasuk golongan Islam.

- Bagi umat Islam, penting untuk melihat kembali prinsip-prinsip demokrasi yang ada dalam ajaran Islam. Islam menekankan pada musyawarah (syura) dan keadilan sosial, yang seharusnya dapat diintegrasikan dalam sistem pemerintahan yang adil dan inklusif, termasuk dalam konteks Demokrasi Terpimpin.
- Dalam konteks ini, penguatan partisipasi politik umat Islam dalam pembentukan kebijakan negara sangat penting agar nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan yang adil.

2. Hubungan Islam dengan Negara:

Pada masa Demokrasi Terpimpin, hubungan antara negara dan Islam menjadi penting. Meskipun pada awalnya ideologi negara Indonesia tidak berdasarkan pada agama, terdapat upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan agama, termasuk Islam, dalam pemerintahan. Beberapa peristiwa seperti penegakan prinsip Pancasila dan pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa Islam memiliki peran dalam merumuskan kebijakan negara.

- Agar sistem negara dapat lebih inklusif, penting bagi negara untuk memberikan ruang bagi umat Islam untuk berperan dalam politik, namun dengan tetap menjaga kebebasan beragama dan keberagaman Indonesia.
- Negara juga dapat lebih mengoptimalkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Pentingnya Keseimbangan Kekuasaan:

Demokrasi Terpimpin seringkali dilihat sebagai sistem yang memberi kekuasaan yang besar pada Presiden Sukarno. Namun, kekuasaan yang terpusat pada satu individu dapat memunculkan risiko otoritarianisme. Dalam hal ini, ada peran penting bagi Islam dalam memberikan panduan moral dan etika bagi penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.

- Umat Islam sebaiknya terlibat dalam pengawasan pemerintahan untuk memastikan agar kekuasaan tidak disalahgunakan, melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia dan organisasi Islam lainnya yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
- Dalam Islam, adalah penting untuk menjaga keadilan, dan ini dapat diterjemahkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang tidak menindas kelompok mana pun.

4. Musyawarah dan Konsensus:

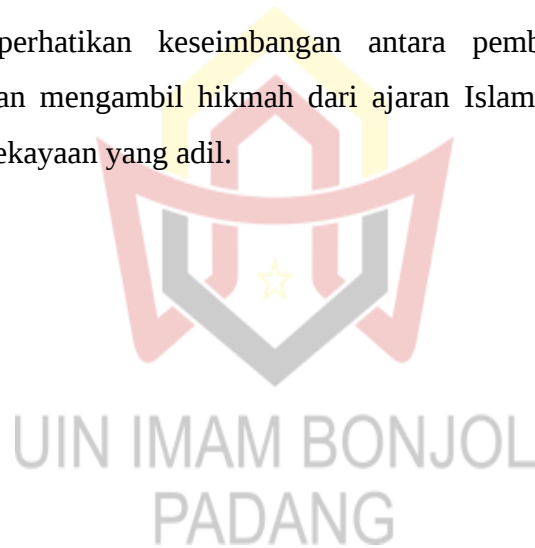
Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, meskipun ada kekuatan presiden yang besar, pendekatan musyawarah tetap dapat menjadi prinsip yang mengarahkan sistem politik untuk lebih adil dan demokratis.

- Agar pemerintahan lebih stabil dan legitim, pemerintah sebaiknya memperhatikan prinsip musyawarah dalam pembuatan kebijakan, termasuk dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan organisasi Islam.
- Proses kristalisasi pada masa ini bisa dioptimalkan dengan mendengarkan suara-suara dari berbagai pihak, termasuk umat Islam, yang sangat besar peranannya dalam membangun konsensus politik.

5. Peran Islam dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Pada periode ini, banyak kebijakan ekonomi yang diluncurkan untuk pembangunan Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan masalah distribusi kekayaan. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki ekonomi, ketimpangan sosial tetap menjadi isu utama.

- Prinsip keadilan sosial dalam Islam dapat memberikan perspektif tambahan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Umat Islam dapat berperan aktif dalam menyarankan kebijakan yang meminimalisir kesenjangan sosial, seperti melalui program zakat dan infaq untuk membantu orang miskin.
- Negara perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemerataan sosial dengan mengambil hikmah dari ajaran Islam mengenai kesejahteraan umum dan pembagian kekayaan yang adil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alfian. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Alfian. Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta: Leknas, 1971
- Alfian. Pemikiran dan perubahan politik Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia, 1978
- Benedict R. O'G, Anderson. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Cornell University Press, 1990
- Chisaan, Choiratun. Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008.; Chisaan, Choiratun “Pencari Identitas Kebudayaan Islam Indonesia 1956-1965”, dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (ed.), Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965, (Denpasar: Pustaka Larasan), 2011
- Dhakidae, Daniel dkk. Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar, Jakarta Kompas, 2013
- Gaffar, Afan. “*Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia*”, dalam Majalah Prospektif, No.1, Vol.4, 1992
- Gilbert J. Gaghan, A. Guide to Historical Method (New York: Fordham University Press), 1984
- Kusumaningrum, Arin. Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966, (Jakarta : Pustaka Abadi), 2019
- Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 1985
- Maarif, A Syafii. Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, (Jakarta: Gema Insani Press), 1996
- Maarif, Ahmad Syafii. Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, dalam Ajat, S. Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah, 2016
- Maarif, A. S. Islam dan politik: teori belah bambu, masa demokrasi terpimpin, 1959-1965. Pimpinan Wilayah Masyumi Gema Insani Jatim, 1996
- Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik Cetakan Keduapuluh Lima. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2003

Noer, Deliar. Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?, dalam Prisma, No.5, Tahun XVII, 1988

Robert, Cribb. The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali. Monash University Press, 1990

Soekarno tentang “Nasionalisme, Islam, Marxisme” dalam bukunya, Di bawah Bendera Revolusi (Jakarta, 1964),

JURNAL :

Diapepin, M. 2020. Memulihkan Komunikasi Belajar dari Jatuh Bangunnya Kabinet Pada Masa Demokrasi Parlementer. TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.11 No. 1, 2020

Dudung Abdurrahman. 1999. Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu),1999

Departemen Penerangan RI, (1961), “Pedoman-Pedoman Pelaksanaan....,

Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 13 Tahun 1959 Tentang Front Nasional.

Departemen Penerangan RI, (1960), “Amanat Presiden Soekarno Pada....,

G, Argenti. 2017. Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2, No 2 November 2017 (FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang), 2017

Herbert, Feith. 2007. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing, 2007

Himawan Indrajat. 2018. *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*. Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1 September 2018 (Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung)

H, Hamdan. 2012. Demokrasi Ala Soekarno Demokrasi Terpimpin. Doctoral dissertation, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2012

Ikrar, I. 2016. Partai-Partai Islam Di Indonesia (Latar Belakang dan Dinamika Perjalanannya). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.1 No.2, 2016

I, Anwar. 2020. Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi Nu-Masyumi Jelang Pemilu 1955. Al-Qalam, 26(2), 2020

Kahin, George McTurnan. 1995. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press, 1995

Kahin, George McTurnan. 1999. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998*. (Amsterdam University Press), 1999

- Kanumoyoso, Bondan. 1996. *Kepemimpinan di dalam NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965*. (Jakarta: UI Press, 1996)
- Winata, Lingga. 2017. *"Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1966"*, Jurnal Pendidikan Sejarah AVATARA, Vol.5 No. 3 Oktober 2017, (Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya), 2017
- Karim M Rusli. 1995. Konflik Islam Kontemporer di Indonesia: Berbagai Variasi dan Kerumitannya, dalam Prisma, No.5, Edisi Mei 1995
- McVey, Ruth T. 2013. *The Rise of Indonesian Communism*. Equinox Publishing, 2013
- Nurul, M. 2019. Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019
- Onghokham. 1981. Soekarno : Mitos dan Realitas dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae, Manusia dalam Kemelut Sejarah, Jakarta: LP3ES, 1981
- Prisma, 1988 No.5, Tahun XVII, 1988
- Ricklefs, M. C. (1991). A Modern History of Indonesia, 1950-1965. Macmillan International Higher Education, 1991
- Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. Palgrave Macmillan.
- Sanggirta, Rio 2017. Dampak Nasakom Terhadap Keadaan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966. 2017
- Simbolon, Frido Paulus.2015. "PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN", jurnal (academia.edu 2015)
- Sudarwanto Pujosantoso. 2018. Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1960), Pontianak : Derwati Press, 2018
- Soyomukti Nurani. 2008. Soekarno dan Nasakom, Garasi, Yogyakarta, 2008
- Onghokham, Soekarno : Mitos dan Realitas dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae, Manusia dalam Kemelut Sejarah, Jakarta: LP3ES, 1981,
- Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu sejarah (Yogyakarta Yayasan Benteng Budaya, 2001).
- E, Kosim. 1983. Metode Sejarah Asas dan Proses (Bandung : Fakultas Sastra Universitas Padjajaran, 1983), bab I, II, III, dan VI, 1983

SKRIPSI :

Rio Sanggirta. Dampak Nasakom Terhadap Keadaan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966, (Universitas Negeri Medan), 2017

WEBSITE :

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/69323/perpres-no-13-tahun-1959> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 1959 tentang Front Nasional. 31 Desember 1959

https://khastara.perpusnas.go.id/uploads/opac/424423_Amanat_Presiden_Sukarno_pembukaan_sidang1_MPRS1960_001.pdf Amanat Presiden Soekarno Pada Pembukaan Sidang Pertama M.P.R.S 10 November 1960

UIN IMAM BONJOL
PADANG